

KETENAGAKERJAAN

2009

PERDA NO. 13, LD.2009/NO.115 SETDA YOGYAKARTA: 24 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK : Sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam rangka terwujudnya pembangunan di bidang ketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan peranan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya pendayagunaan dan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin maju, maka untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja, perlu untuk menyiapkan tenaga kerja, meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kesejahteraan, menjamin kepastian kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa adanya diskriminasi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2007 Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha. Isi peraturan daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; ruang lingkup ketenagakerjaan; azas dan tujuan penyelenggaraan ketenagakerjaan; pelatihan kerja; penempatan tenaga kerja; hubungan industrial; perlindungan pekerja rumah tangga; pembinaan dan pengawasan; sanksi; penyidikan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN :
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2009.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak diundangkan.
- Penjelasan terdiri dari 5 halaman.